KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2						H.4 X Final H.5 Tidak Final	
				11.2 Temperatum Ne- 0 III Temperatum					n.5 IIIIIIII	
A. IDEN	TITAS PENERIN	MA PENGHASILA	N YANG	DIPOTONG						
A.1 NPWP : 98 168 281 8 728 000										
A.2 NIK	:									
A.3 Nama : YULIANUS RADA										
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
		G DIPOTONG E OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO		DASAR PENGENAAN PAJAK		TARIF LEBIH TINGGI 20%	TARIF	PPh DIPOTONG/DTP	
(mm-yyyy)				(Rp)	(Rp)		(TIDAK BER- NPWP)	(%)	(Rp)	
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4		B.5	B.6	B.7	
	1 :	21-402-01		4.590.900		4.590.900	0	5	229.545	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 50										
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy								2 0 2 2 <i>уууу</i>		
В.9	9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
No	Nomor: Tanggal									
B.10	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
в.11 _										
					•					
C. IDEN	TITAS PEMOTO	ONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :				9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								TIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :								_		
C.4 Tanggal :			2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 2 yyyy							
C.5 Nama Penandatangan :				HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pe tandatangani secara elektronik.						gan/Pemungu	tan Unifikasi telah	saya isi dengan	benar dan telah saya	
				dengan ketentuan yang iik sehingga tidak diperl		lenderal Pajak	k mengatur bahwa	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

RBW0P44F